



**PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI FASILITATOR PENINGKATAN
USAHA INDUSTRI *HANDYCRAFT* DI DESA TUTUL KECAMATAN
BALUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Dwisma Agista Maulida
NIM 140910201044**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI FASILITATOR PENINGKATAN
USAHA INDUSTRI *HANDYCRAFT* DI DESA TUTUL KECAMATAN
BALUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

**Dwisma Agista Maulida
NIM 140910201044**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ibunda Nunung Farida dan Ayahanda Agus Santoso yang senantiasa menyertakan do'anya dalam setiap sujudnya dan senantiasa mencurahkan kasih sayang, motivasi diri dan pembelajaran hidup hingga penulis sampai pada titik ini, terima kasih banyak.
2. Beserta Kakak Dana Gugus Maulana serta Adik Lindu aji Arobi yang selalu menjadi pendukung saya dalam suka maupun duka.
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman, yang telah sabar dengan ikhlas membimbing dan banyak memberikan ilmu pengetahuan.
4. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

HALAMAN MOTTO

Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus memiliki ilmu, dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu¹. (Imam As-Syafi'i.)

Bismillahirrahmanirrahim²

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

¹ <https://www.alsowah.or.id/cetakkhutbah.php?id=205> (diakses pada 16 Mei 2018 Pukul 05.29 WIB)

² Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT kumudasmoro Grafindo

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dwisma Agista Maulida

NIM : 140910201044

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri Handycraft Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2019

Yang menyatakan,

Dwisma Agista Maulida
NIM 140910201044

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI FASILITATOR PENINGKATAN
USAHA INDUSTRI HANDYCRAFT DI DESA TUTUL KECAMATAN
BALUNG KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Dwisma Agista Maulida

NIM 140910201044

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri *Handycraft* Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember” karya Dwisma Agista Maulida telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 04 April 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

Drs. A Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Anggota Penguji :

1. Dr. Sutomo, M.Si ()
NIP 196503121991031016
2. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP 196306061988021001
3. Hermanto Rohman, S.Sos,MPA ()
NIP 197903032005011001

Menyatakan
Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri Handycraft Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember; Dwisma

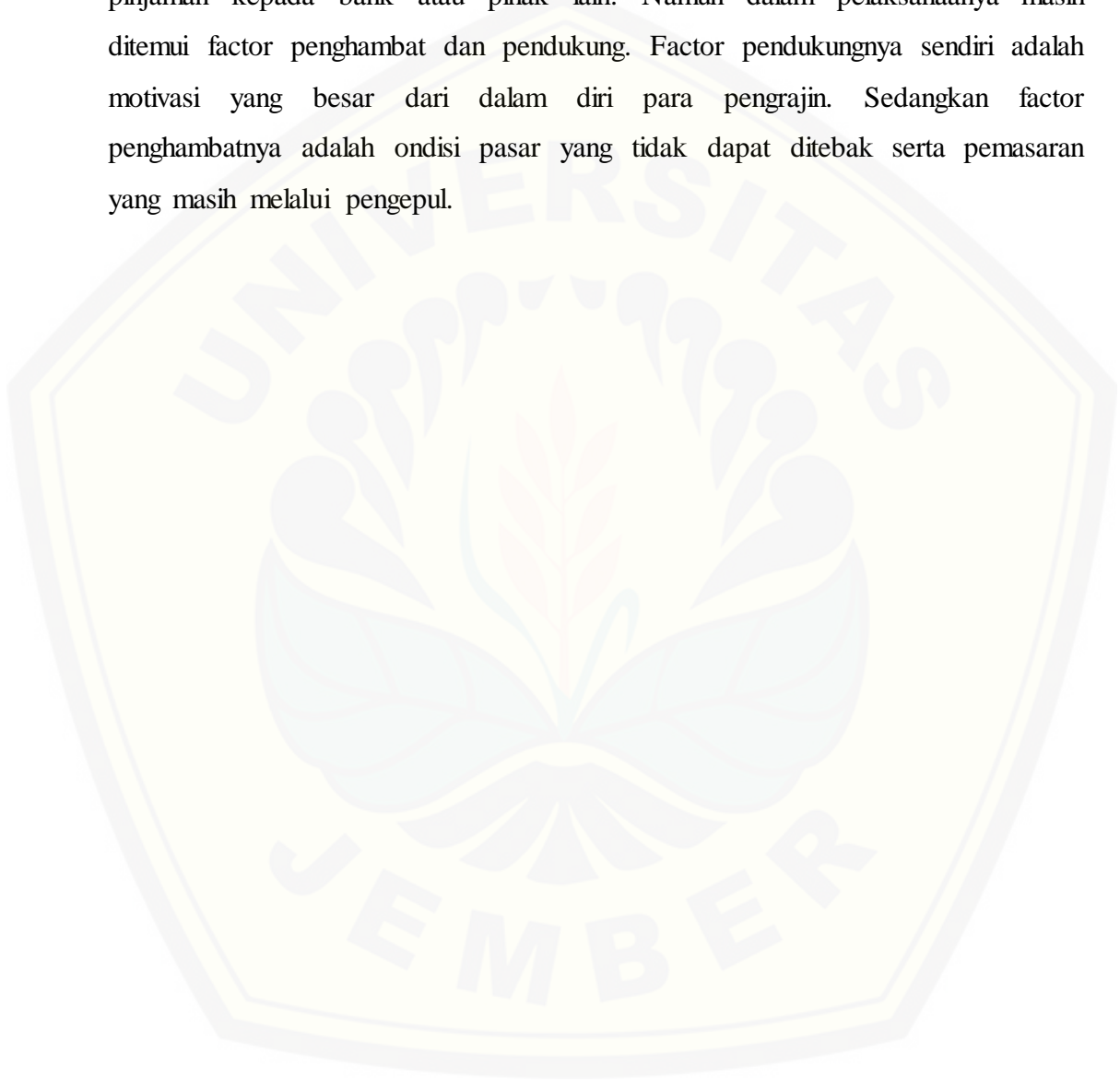
Agista Maulida, 140910201044; 2019: 95 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan di Desa Tutul terkait dengan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam upaya meningkatkan usaha industri *Handycraft*. Permasalahan tersebut meliputi masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tutul. Kemudian permasalahan lain terkait dengan masalah pemasaran, hal ini dianggap penting karena pemasaran berkaitan dengan sampainya produk kepada konsumen. Selama ini pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku industry disana masih dirasa kurang efektif, karena masih melalui pihak ketiga atau pengepul. Pengepul mengambil produk dari para produsen dengan harga yang murah, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini terkait dengan pemasaran produk dari Desa Tutul.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, Ketekunan pengamatan, Pengecekan sejawat dan Kecukupan referensial. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data milik Miles dan Huberman

Hasil penelitian berupa Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri Handycraft Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember ditunjukkan dalam dua bidang, yaitu fasilitator pendampingan serta fasilitator bidang permodalan dan pendanaan. Fasilitator bidang pendampingan ditunjukkan oleh pemerintah Desa melalui beberapa hal yaitu memfasilitasi adanya pelatihan bagi sumber daya manusia yang ada di Desa Tutul, membuka akses kerjasama dengan berbagai pihak, membantu mempermudah pengurusan administratif, membantu dalam perolehan bahan baku, pemerintah desa sebagai penyampai

informasi kepada masyarakat. Sedangkan dari bidang permodalan dan pendanaan ditunjukkan pemerintah Desa dengan Sebagai perantara antara pihak pemberi pinjaman dengan para pengrajin. Pemerintah desa memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengrajin yang mengurus persyaratan untuk mengajukan pinjaman kepada bank atau pihak lain. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui factor penghambat dan pendukung. Factor pendukungnya sendiri adalah motivasi yang besar dari dalam diri para pengrajin. Sedangkan factor penghambatnya adalah kondisi pasar yang tidak dapat ditebak serta pemasaran yang masih melalui pengepul.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri Handycraft Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dan juga Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. Anwar, M.Si Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran mengenai akademik selama penulis menjadi mahasiswa baru sampai lulus sekarang ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu untuk kelancaran penulis.

9. Ibu Juana selaku Kepala Desa Tutul, Bapak Maksun selaku Kasi Pemerintahan Desa Tutul, Bapak Hadi dan Bapak Hasbullah selaku Pengusaha/Pengrajin di Desa Tutul, Terimakasih telah memberikan izin penelitian dan meuangkan waktu dalam hal penelitian ini serta telah memberikan data dan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh penulis.
10. Kedua orang tua penulis, Ibunda Nunung Farida dan Ayahanda Agus Santoso yang tidak pernah berhenti berdo'a dan memberikan semangat serta menjadi motivasi terbesar kepada penulis hingga saat ini. Semoga Ibu dan Ayah selalu mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah SWT.
11. Kakak dan Adik penulis, Kakak Dana Gugus Maulana dan Adik Lindu Aji A Robi yang telah memberikan semangat dukungan serta doa kepada penulis.
12. Seluruh Keluarga Besar Keponakan dan Sepupu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Terimakasih atas dukungan motivasi dan doa kepada penulis.
13. Andi Harsono terima kasih telah memberikan semangat dukungan dan doa tiada hentinya, selalu meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat "Team Halu" Oktavia Nabilah Ghaisani, Maraniga Putri Nurindra, Zulfa Mazidah, terimakasih telah menemani hari-hari dikala sedih maupun senang, meluangkan waktu, tenaga juga pikiran selama ini, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik, semoga kesuksesan menyertai kalian semua.
15. Sahabatku Muhammad Labib Rusdi, terima kasih selalu memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis, mendengarkan curahan hati ketika merasa kesulitan dalam menjalankan skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat semasa TK,SD,SMP,SMA yang tidak dapat disebut satu-persatu, terimakasih untuk perhatian dan dukungan kalian kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

17. Sahabat Kos di Jalan Jawa 4, terima kasih atas masukan dan dukungan kalian kepada penulis.
18. Seluruh Sahabat voli yang tidak dapat di sebut satu-persatu, terima kasih untuk perhatian dan dukungan serta doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman dekat penulis yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini, Karomatul afida, Febri Subachtiar, Yogi Haqiqi Fanani, Lenyana Budi Erwandayani, Nur Erfiana, Eka Sherli Haniah Oktahana, Dessy Novitasari, Rizma Maghfirotul Azizah, Andita Purnama Sari, Imelda Oktaviana, Lina Widyarini, Anikdatul Mila, Nia Mega.
20. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014 serta teman-temanku konsentrasi Pemerintah Daerah 2014. Terima kasih telah memberikan ruang diskusi dan belajar bersama selama ini;
21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 15 Februari 2019

Yang menyatakan,

Dwisma Agista Maulida
NIM 140910201044

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Administrasi Publik.....	14
2.2 Administrasi Pemerintaah Desa.....	20
2.2.1 Pemerintah Desa	21
2.2.2 Fungsi Pemerintah Desa	22
2.2.3 Peranan Pemerintah Desa.....	24
2.3 Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator.....	27
2.4 Industri.....	33
2.5 Penelitian Terdahulu.....	38
2.6 Kerangka Berfikir	39

BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.3 Data dan Sumber Data	42
3.4 Penentuan Informan.....	43
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	48
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	49
BAB 4 PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember dalam Peningkatan Usaha handycraft.....	51
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Balung.....	53
4.1.3 Desa Tutul.....	55
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	60
4.3 Penyajian Hasil Penelitian.....	62
4.3.1 Gambaran Usaha Handycraft di Desa Tutul	63
4.3.2 Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri <i>Handycraft</i>	69
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Usaha Industri <i>Handycraft</i>	85
4.4.1 Faktor Pendukung	85
4.4.2 Faktor Penghambat.....	86
4.5 Analisis Hasil Penelitian.....	88
4.5.1 Fasilitator di Bidang Pendampingan.....	88
4.5.2 Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan.....	90
4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	91
4.6 Matriks Hasil Penelitian	93
BAB 5 PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

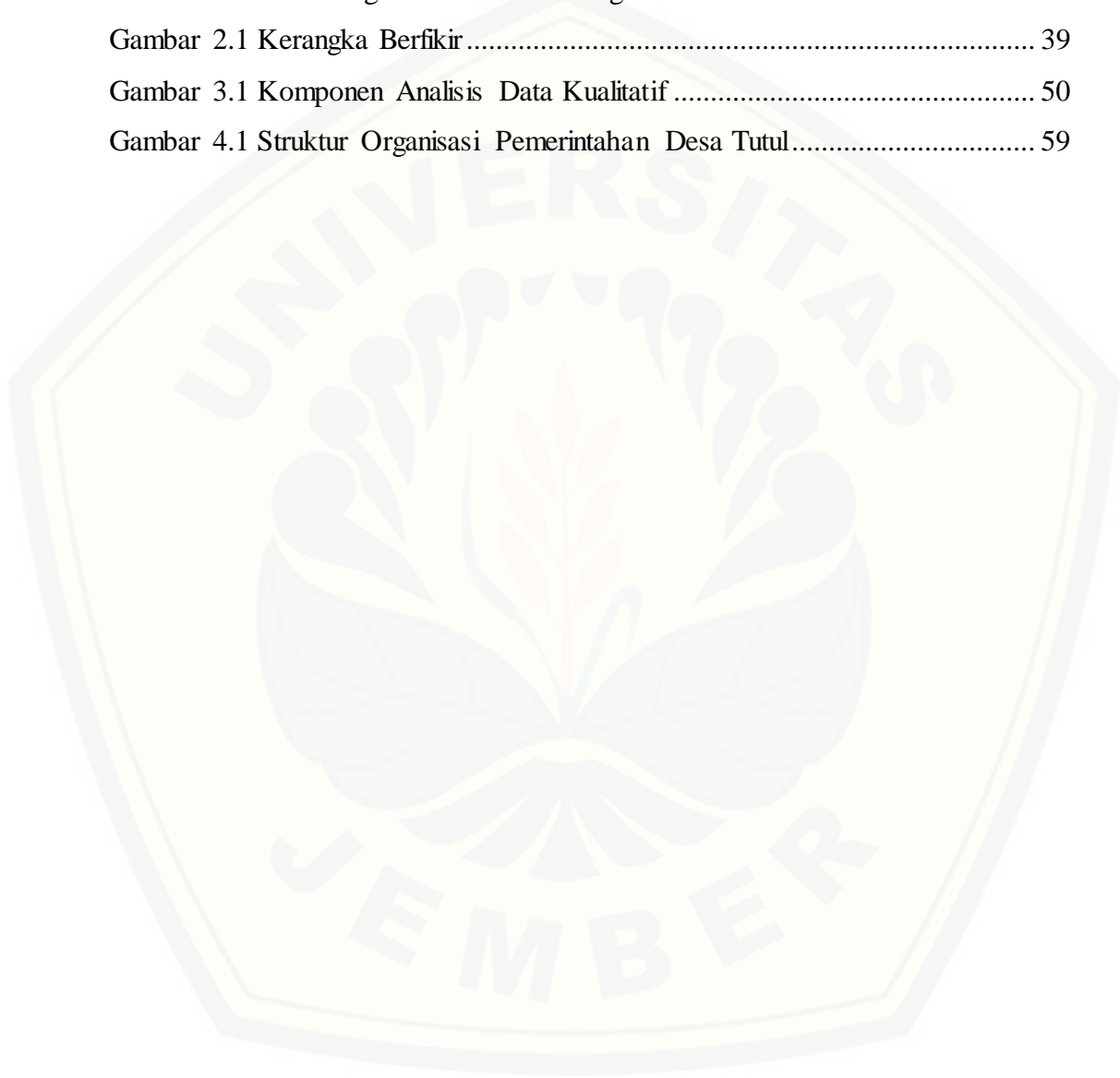


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Unit Usaha Yang Ada Di Desa Tutul.....	2
Tabel 1.2 Daftar Sentra Industri di Kabupaten Jember	7
Tabel 1.3 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	9
Tabel 2.1 Karakteristik Usaha Kecil Menengah di Negara Sedang Berkembang	37
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Teknik Perolehan Data	47
Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan.....	48
Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Tutul.....	57
Tabel 4.2 Rincian Jumlah Penduduk di Desa Tutul Berdasarkan Kelompok Usia	57
Tabel 4.3 Struktur Mata pencaharian Menurut Sector Di Desa Tutul.....	57
Tabel 4.4 Prosentase tingkat pendidikan Desa Tutul.....	58
Tabel 4.5 Pemerintah Desa Tutul.....	59
Tabel 4.6 Jenis/Bentuk Usaha yang di Kembangkan di Desa Tutul.....	63
Tabel 4.7 Unit Usaha Yang Ada di Desa Tutul.....	65
Tabel 4.8 Unit Usaha Industri Handycraft Di Desa Tutul.....	66
Tabel 4.9 Persebaran Jumlah Industri Di Desa Tutul.....	69
Tabel 4.10 Pelatihan yang diadakan oleh BLK Jember.....	73
Tabel 4.11 Kerjasama yang dijalin dalam upaya peningkatan usaha handycraft.	75
Tabel 4.12 Matrix Hasil dan Pembahasan.....	93
Tabel 4.13 Peningkatan Usaha Idustry Handycraft Tahun 2018 Menurut Triwulan	94
Tabel 4.14 Matrix Kaitan Fungsi Fasilitator Dengan Peningkatan Usaha Industry Handycraft Tahun 2018.....	95

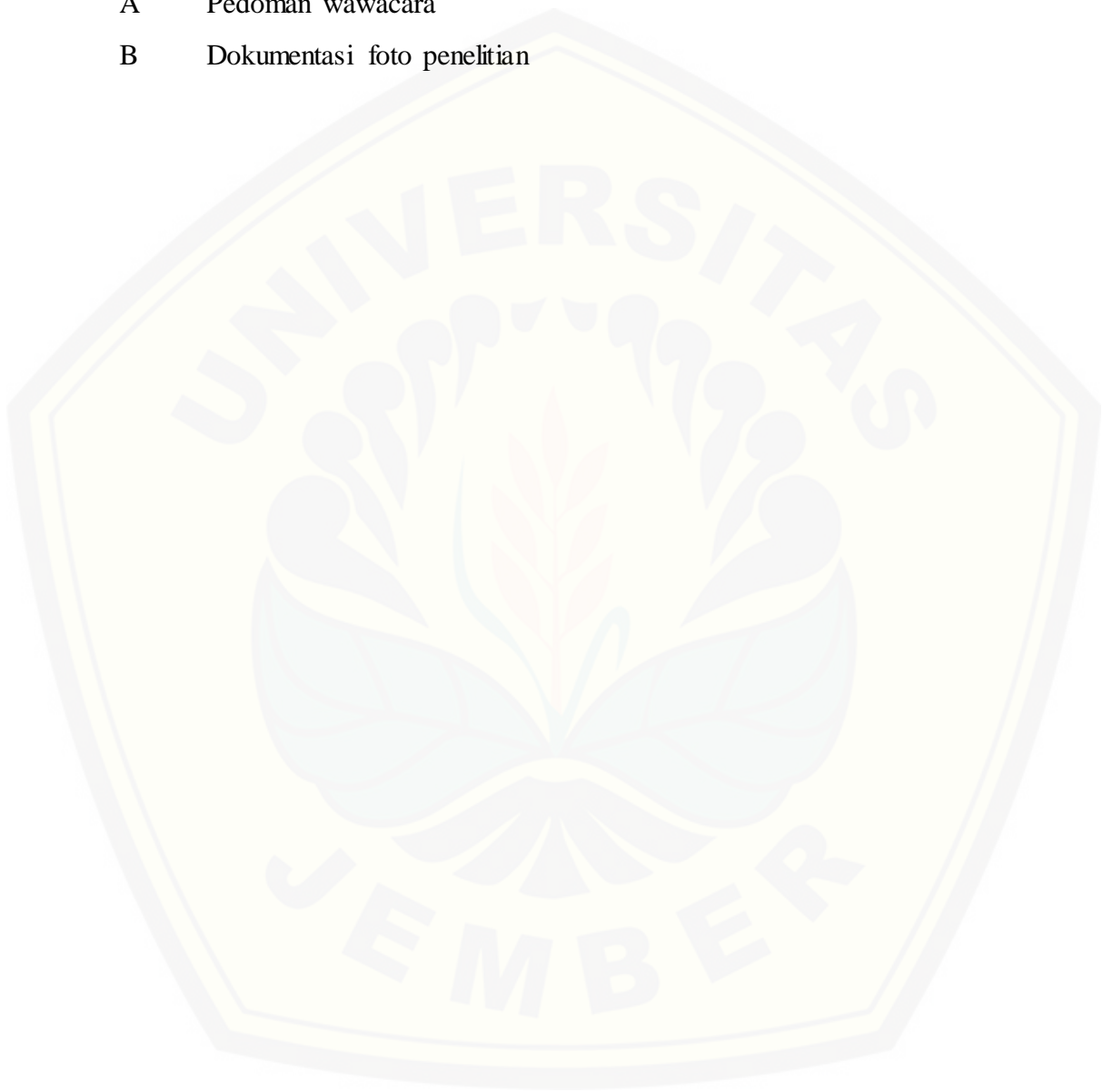
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pencanaan Desa Tutul sebagai Desa Produktif Nasional.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tutul.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

- A Pedoman wawancara
- B Dokumentasi foto penelitian



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintahan desa sebagai fasilitator peningkatan usaha industri *handycraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Fenomena yang mendasari dilaksanakannya penelitian di Desa Tutul adalah karena adanya permasalahan terkait dengan peningkatan usaha *handycraft* di Desa Tutul. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan ini, termasuk dalam kegiatan produksi, pemasaran *handicraft* Desa Tutul. Apabila kualitas sumber daya manusia yang menangani tersebut baik, maka produk yang akan dihasilkan juga memiliki kualitas baik pula. Seperti yang kita tahu bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM di desa mengingat seringkali masyarakat desa kurang menerima transfer pengetahuan mengenai pengembangan usaha perekonomian seperti *handycraft* yang ada di Desa Balung tersebut. Berdasarkan wawancara dengan si Kepemerintahan perangkat Desa Tutul menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tutul adalah berlatar belakang pendidikan SLTA sehingga masih dibutuhkan peningkatan skill terkait dengan manajemen industry kecil dan pemasaran yang efektif.

Kemudain dibalik kesuksesan yang telah diraih Desa Tutul masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan usaha *handicraft* ini. Salah satunya adalah masalah pemasaran, hal ini dianggap penting karena pemasaran berkaitan dengan sampainya produk kepada konsumen. Maka dari itu dibutuhkan strategi pemasaran yang massif agar produk dari desa tutul ini dapat dikenal oleh masyarakat luas termasuk yang ada di luar Desa Tutul. Selama ini pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku industry disana masih dirasa kurang efektif, karena masih melalui pihak ketiga atau pengepul. Pengepul mengambil produk dari para produsen dengan harga yang murah, sehingga dibutuhkan peran pemerintahan dalam hal ini terkait dengan pemasaran produk dari Desa Tutul. Selain itu, bahan baku yang digunakan oleh pengrajin Desa Tutul belum

semuanya bisa di dapatkan dari dalam Desa Tutul sendiri, namun harus mendatangkan dari luar kota bahkan luar pulau. Maka dari itu pengrajin terkadang merasa ini yang membuat terhambatnya kegiatan usaha handicraft tersebut.

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin tersebut dibutuhkan peran dari Pemerintahan Desa Tutul. Karena pemerintahan Desa juga memiliki pengaruh untuk kemajuan industri *handycraft*, dan pemerintahan Desa juga memegang peranan untuk mensejahterahkan masyarakat Desa terutama dalam segi perekonomian yang menjadi tolak ukur kesejahteraan Desa itu sendiri. Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 tentang desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah pemerintah desa beserta dengan Badan Permusyawaratan desa yang dalam hal ini meruapkan lembaga legislative di desa.

Penelitian ini berfokus pada Desa Tutul Kecamatan Balung, peneliti memilih Desa Tutul ini dikarenakan Desa Tutul merupakan salah satu desa di Indonesia yang masuk dalam program desa produktif nasional menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Desa Tutul yang terletak di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013, desa ini memperoleh penghargaan sebagai desa produktif nasional karena tidak adanya pengangguran. Desa ini dicanangkan oleh Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai desa potensial dan menjadi contoh desa yang sukses meningkatkan ekonomi dari hasil kerajinan tangan dan kreatifitasnya dengan penghasilan mencapai 5,6 juta/ bulan pada tahun 2012.

Berikut merupakan data jenis usaha di Desa Tutul, jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha tersebut:

Tabel 1.1 Data Unit Usaha Yang Ada Di Desa Tutul

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Salon Kecantikan	1	3
2.	Tasbih	289	784
3.	Sangkar Burung	1	1
4.	Desain (Tasbeh,Kalung,dll)	449	924
5.	Manik-Manik Dan Kayu	117	280
6.	Sumpit	18	186
7.	Gip Som	7	23
8.	Miniatur Surfing	1	2
9.	Pengrajin (Batu,Tulang, dll)	156	359

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit	Jumlah Tenaga Kerja
10.	Bambu	2	3
11.	Peternak (Ayam,Itik, dll)	9	149
12.	Pedagang (Tahu/Tempe)	4	10
13.	Bengkora Semen	1	2
14.	Tusuk Sate	1	2
15.	Jam Tangan	1	1
Total		1.057	2.728

Sumber : Kepala seksi pemerintahan Desa Tutul

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kerajinan tangan di Desa Tutul adalah bergerak dibidang kerajinan manic-manik seperti tasbih. Semua

Desa Tutul juga dinobatkan sebagi salah satu desa produktif di tanah air oleh Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 19 januari 2013. Desa Tutul adalah desa produktif yang di dalamnya terdapat kemandirian, kreativitas, keahlian, dan usaha bersama dari masyarakatnya untuk mengelola potensi yang ada di Desa Tutul menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dan bermanfaat bagi kehidupan bersama masyarakat sekitarnya. Adanya usaha industry handycraft di Desa Tutul ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan. Selain itu yang bisa kita lihat secara langsung adalah penyerapan tenaga kerja untuk produksi kerajinan, sehingga hal ini bisa menurunkan tingkat pengangguran di Desa Tutul.

Berbagai jenis kerajinan tangan (*handicraft*) bisa ditemui di daerah ini, mulai dari peralatan dapur, sampai manic-manik dan alat musik tradisional. Contohnya saja alat musik tradisional berupa Jimbe dan Diageridoo (riduridu), maupun senjata tradisional Bumerang. Selama ini, meskipun penjualan semua alat musik dan senjata tradisional yang dihasilkan pengrajin Desa Tutul, masih melalui pihak ketiga, namun kualitasnya sudah sangat diakui masyarakat dunia. Buktinya, alat musik tradisional berupa Jimbe, sudah dipasarkan ke Uzbekistan, Turki, Afrika Selatan, Perancis, dan negara negara Amerika Latin. Sedangkan untuk senjata tradisional Suku Aborigin yang juga diproduksi perajin Tutul, sebagian besar dipasarkan ke Australia dan Amerika. Usaha industri di Kabupaten Jember pada tahun 2013 sebanyak 24 sentra industri yang meliputi industri makanan dan kerajinan tangan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.

Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan peneliti, Desa Tutul merupakan desa yang seperti pada umumnya, yang merupakan pemukiman penduduk, yang memiliki pemerintahan sendiri yaitu pemerintahan desa, dan sebagian besar dari penduduk desa bermata pencaharian di bidang agraris. Namun yang menarik dan membedakan Desa Tutul dengan desa lainnya yaitu terletak pada aktivitas kewirausahaan dibidang kerajinan tangan (*handicraft*) yang hampir dikelola oleh seluruh masyarakat di Desa Tutul. karena selain bertani sebagian besar dari masyarakat tutul bermata pencaharian dibidang industri *handicraft*. Di dalam observasi peneliti melihat ibu-ibu rumah tangga di Desa Tutul, mereka bekerja sebagai perangkai tasbih atau aksesoris untuk menambah penghasilan ekonomi keluarganya, selain itu di Desa Tutul juga banyak ditemui galeri atau rumah-rumah warga yang memamerkan aneka produk kerajinan tangan khas Desa Tutul, serta menjadikan rumahnya sebagai *home industry*.

Terdapat sekitar 1.057 *home industry* kerajinan tangan di Desa Tutul yang tersebar di empat dusun. Dengan adanya usaha *handicraft* tersebut mampu menyerap tenaga kerja sejumlah 2.728 orang yang beraasal dari Desa Tutul itu sendiri. Usaha kreatif dibidang kerajinan tangan tersebut dikelola mulai dari perorangan atau keluarga hingga kelompok. Produk-produk kerajinan tangan yang telah dihasilkan diantaranya berbentuk aksesoris dan tasbih sebagai produk khas Tutul yang terbesar, dan ada pula produk yang lain seperti peralatan dapur, miniatur dan barang-barang antic serta masih banyak yang lainnya. Aneka hasil kerajinan tangan tersebut terbuat dari bahan kayu-kayuan baik kayu yang dibeli secara utuh maupun kayu-kayu yang diperoleh dari hasil limbah industri meubel, ada juga yang terbuat dari batu-batuan, tulang hewan, gigi sapi, resin, dan lain sebagainya.

Sebagai pusat produksi kerajinan kayu berupa manik-manik gelang kalung dan tasbih yang paling banyak diproduksi sekarang ini berbahan kayu. Ribuan warga yang mahir membuat aneka aksesoris dari kayu bisa menembus ekspor ke Cina dan dijual lokal di Banyuwangi, Bali, Jakarta, Surabaya dan kota lainnya. Data Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, dari total 10.226 warga Desa Tutul 5.044 penduduk laki-laki 5.182 penduduk perempuan, jumlah

total kepala keluarga adalah 3.080 jiwa, jumlah total kepala keluarga perempuan adalah 700 jiwa, ada sekitar 1.057 orang yang berprofesi sebagai pengrajin. Industri kerajinan tangan di Desa Tutul ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta memberikan keuntungan material bagi para pemilik rumah industri / pengusaha kerajinan *handicraft*. Sentra Industri *handicraft* di Desa Tutul merupakan salah satu contoh industri yang berhasil meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui pengelolaan yang baik, contohnya mampu meningkatkan penghasilan rata-rata masyarakat yang tadinya hanya sebesar Rp 400.000 menjadi Rp 5.400.000 per orang per bulan (pada tahun 2011), dan pada tahun 2012 menjadi Rp 5.600.000,- (<http://nasional.sindonews.com>). Sehingga Desa Tutul kemudian dijadikan sebagai desa percontohan industri kerajinan tangan melalui program desa produktif 2013.

Gambar 1. 1 Pencanangan Desa Tutul sebagai Desa Produktif Nasional



Sumber: <http://www.wisatacraftjember.com>

Tanggung jawab utama dari program pembangunan adalah mewujudkan masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih focus peran pemerintah desa sebagai fasilitator, hal ini dikarenakan melihat fenomena yang dialami oleh para pengrajin di Desa Tutul yang membutuhkan adanya fasilitasi dalam mengembangkan usahanya. Misalkan saja ketika melakukan pemasaran, selama ini pengusaha handycraft memasarkan kerajinannya lewat pengepul yang tentunya dibeli dengan harga murah, sehingga keuntungan yang didapatkan sedikit. Maka dari itu sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sudah menjadi tugas dari pemerintahan desa Tutul untuk memberikan fasilitasi kepada para pengrajin dalam memasarkan produknya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan PT Telkom Jember dalam mengadakan pelatihan pemasaran online, sehingga saat ini pengrajin sudah bisa memasarkan produknya lewat media social.

Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multi-dimensi yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Tetapi, kenyataannya lain menunjukkan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah.

Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang masyarakatnya memiliki banyak potensi kegiatan kerajinan tangan adalah Kabupaten Jember. Hal ini dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1.2 Daftar Sentra Industri di Kabupaten Jember

No	Kecamatan-Desa	Sentra Industri	Bidang Industri
1	Puger	Terasi	Makanan
2	Ambulu-Andongsari	Tempe	Makanan
3	Ambulu	Tahu	Makanan
4	Jenggawah-Cangkring	Tempe	Makanan
5	Semboro	Tape	Makanan
6	Rambipuji	Tahu	Makanan
7	Ajung-Mangaran	Tahu	Makanan
8	Kaliwates	Kerupuk	Makanan
9	Wuluhan-Lojejer	Gula kelapa	Makanan
10	Balung-Tutul	Kalung & Tasbeh	Kerajinan tangan
11	Balung	Sarangan	Kerajinan tangan
12	Puger	Keset	Kerajinan tangan
13	Rambi	Anyaman tikar	Kerajinan tangan
14	Rambi	Anyaman bambu	Kerajinan tangan
15	Sukowono	Sangkar burung	Kerajinan tangan
16	Silo	Kereh bamboo	Kerajinan tangan
17	Wuluhan-Kesilir	Gerabah	Kerajinan tangan
18	Sumbersari –Karangrejo	Batu bara	Kerajinan tangan
19	Tanggul-Selodokan	Anyaman bambu	Kerajinan tangan
20	Bangsalsari	Genteng	Kerajinan tangan
21	Pakusari	Anyaman bambu	Kerajinan tangan
22	Pakusari	Batu piring	Kerajinan tangan
23	Patrang	Batu bata	Kerajinan tangan
24	Sukorambi	Anyaman bamboo	Kerajinan tangan

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember (2013)

Tingginya jumlah penduduk di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan serius bagi proses pembangunan bangsa yang sedang dilaksanakan, ditambah lagi dengan tidak didukungnya sumber daya manusia yang kualitas. Berdasarkan laporan data UNDP dalam HDR (Human Development Report)

2016, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lainnya khususnya negara di ASEAN. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia berada pada peringkat 113 dari 188 negara di dunia dengan nilai indeks 0.689. Sedangkan negara Singapura di peringkat 5, Brunei Darussalam peringkat 30, Malaysia peringkat 59, dan Thailand peringkat 87. (hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf).

Kegiatan kerajinan tangan atau *handicraft* menjadi salah satu kegiatan yang memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan kondisi masyarakat desa. Kerajinan tangan menurut Yopi N. Nasir (2013: 5) adalah kegiatan seni yang mengolah bahan-bahan tertentu menjadi produk yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga mengandung nilai-nilai estetika. Kegiatan kerajinan tangan memiliki prospek yang cerah karena produk kerajinan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 Ayat 1 dan 2 adalah pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan desa harus dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang meningkatkan peran dalam pemerataan pembangunan Desa serta pengawasan terpadu secara konsisten agar tercapai peningkatan efisien dalam penyelenggaraan pembangunan. Di dalam pengembangan Desa Tutul untuk meningkatkan usaha industri *handicraft* harus dilakukan secara optimal agar mendapatkan hasil yang benar-benar tepat sasaran.

Penduduk di pedesaan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan mayoritas mata pencahariannya hanya bertumpu pada sektor agraris sebagai petani. Sebagian besar petani hanya memiliki lahan yang sempit untuk digarap, bahkan tidak sedikit menjadi pekerja lepas. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakberdayaan masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan hidup

yang mengakibatkan rendahnya penghasilan dan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.

Tabel 1.3 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No	Pendidikan yang ditamatkan	2016 Agustus	2017 Februari
1	Tidak/belum pernah sekolah	59.346	92.331
2	Tidak/belum tamat SD	384.069	546.897
3	SD	1.035.731	1.292.234
4	SLTP	1.294.483	1.281.240
5	SLTA umum	1.950.626	1.552.894
6	SLTA Kejuruan	1.520.549	1.383.022
7	Akademi/Diploma	219.736	249.705
8	Universitas	567.235	606.939

Sumber: BPS diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (Update terakhir 19 Juni 2017, diambil dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972>)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk yang Tidak/belum pernah sekolah, Tidak/belum tamat SD, SD, Akademi/Diploma, dan Universitas cenderung meningkat dibandingkan di SLTP, SLTA Umum/SMU, dan SLTA Kejuruan/SMK..

Kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di pedesaan akan menimbulkan urbanisasi, masyarakat desa banyak yang mengadu nasib dipertkotaan dengan harapan kehidupannya bisa menjadi lebih baik.. Arus urbanisasi yang terus berkembang akan membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak. Yang mana di perkotaan terjadi penambahan jumlah penduduk yang seringkali tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru. Bahkan mayoritas pendatang dari desa kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi persaingan di perkotaan, sehingga akan mengakibatkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan di daerah perkotaan.

Beragam permasalahan yang ada di desa perlu segera dicari jalan keluarnya agar kualitas hidup masyarakat desa dapat meningkat. Salah satu solusinya dengan melaksanakan pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat adalah suatu upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah (Sudjana, 2001:261).

Pembangunan masyarakat desa akan efektif apabila melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di berbagai kegiatan pembangunan. Masyarakat diberi kuasa penuh untuk memilih sendiri jenis dan keragaman kegiatan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam usaha memecahkan masalah di kehidupan mereka.

Terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan, berorientasi ke depan dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing untuk menuju kemandirian (Oos M. Anwas, 2014: 48). Kemandirian yang dimaksud mencakup kemandirian untuk memikirkan, memutuskan dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Kemandirian masyarakat merupakan salah satu kondisi yang dialami oleh masyarakat ditandai dengan kemampuan mereka untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentunya memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengemban tugas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa menurut (Ndraha, 2010:36), Pemerintahan Desa memiliki dua fungsi dasar yaitu Fungsi primer atau fungsi pelayanan dan juga Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi pemberdayaan Pemerintahan Desa memiliki tiga peran sebagai berikut:

Peran Pemerintahan Desa yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintahan yang dimaksud antara lain :

a. Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intendif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan fungsi pemerintahan sebagai fasilitator, khususnya fasilitator dalam upaya peningkatan usaha industri *handycraft*. Karena melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin sudah seharusnya Pemerintahan Desa mencari solusi. Diharapkan peran dari Pemerintahan Desa sebagai fasilitator yaitu mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan perkembangan ekonomi di Desa Tutul. Sebagai fasilitator, pemerintahan bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Peran

pemerintahan sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram yang merupakan kewajiban pemerintahan Desa Tutul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pemerintahan desa sebagai Fasilitator peningkatan Usaha Industri *Handycraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk memecahkan atau mencari solusi atau masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dipahami apa sebenarnya masalah itu. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu perasaan keingintahuan, kegundahan, dan kebingungan yang timbul akibat adanya ketidakjelasan atau suatu fenomena yang terjadi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah itu terjadi sekaligus menimbulkan keingintahuan peneliti terkait solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu, lebih lanjut masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena.

Berbeda dengan masalah, Sugiyono (2001:35) menjelaskan bahwa rumusan masalah diartikan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana Pemerintahan desa sebagai Fasilitator peningkatan Usaha Industri *Handycraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto (1994:49) yang dimaksud

dengan tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang ingin diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya, sesuatu yang ingin diperoleh merupakan tujuan penelitian. Tujuan tersebut merupakan jawaban dari masalah penelitian.

Berdasarkan pendapat Arikunto di atas, maka tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pemerintahan desa sebagai fasilitator peningkatan usaha industri *handycraft* di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember untuk meningkatkan usaha industri *handycraft*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan studi peran pemerintahan desa sebagai fasilitator peningkatan usaha *handycraft* dan bahan kepustakaan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Secara Praktis dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintahan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam meningkatkan usaha industri *handycraft* selanjutnya yang lebih tepat dengan harapan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat mampu meningkatkan usaha industri *handycraft*.
3. Individu melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diperoleh diperkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:22) meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan maalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang di kaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusah hipotesis dan asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Moleong (2008:8) mengungkapkan bahwa seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orintasi teoritis. Sehingga, tinjauan pustaka menjadi kerangka berfikir bagi peneliti. Konsep dasar menurut Usman dan Akbar (2003:88) merupakan pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proporsi dan teori. Konsep menjadi bagian yang penting dalam penelitian karna memberikan sebuah kerangka berfikir yang sesuai penelitian. Konsep tersebut terdiri dari:

- a. Administrasi publik
- b. Administrasi pemerintah desa
- c. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator
- d. Industri
- e. Penelitian terdahulu
- f. Kerangka berfikir

2.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta semua hal yang berkaitan dengan publik yang mencakup kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Secara sederhana, menurut John M. Pfifner dan Robert V. Presthus dalam Syafie (2009:31) pengertian administrasi publik adalah ilmu yang

mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk tentang birokrasi; penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah dan juga good governance

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafie (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a) Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b) Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c) Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.”

Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa: Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Newman, menyebut "*The Work of Administration*" yang dapat dibagi dalam 5 proses, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Pengumpulan Sumber (*Assembling Resources*)
- d. Pengendalian Kerja (*Supervising*)
- e. Pengawasan (*Controlling*)

Pengertian Teori Administrasi Publik Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu "ad" dan "ministrate" yang berarti "to serve" yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi². Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011: 6). Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 4) adalah

proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).

Berikut teori-teori administrasi publik yang dikutip dari berbagai literatur :

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1985) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu :

- (1) aktivitas organisasi
- (2) fungsi atau tugas pimpinan
- (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

- a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
- b. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.
- c. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
- d. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.

- e. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
- f. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
- g. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
- h. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- i. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
- j. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
- k. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
- l. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
- m. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
- n. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

- a. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
- b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
- c. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.

- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

- a. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
- b. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
- c. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
- d. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
- e. Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Penjelasan terkait dengan konsep Administrasi Publik dibutuhkan peneliti sebagai dasar bahwa penelitian ini berasal dari bidang keilmuan Administrasi Publik. Agar nantinya fokus dan lokus dalam penelitian ini tidak menyimpang ke ranah yang lain, maka perlu kiranya untuk menjelaskan terkait rumah dari penelitian ini yaitu Administrasi Publik.

2.2 Administrasi Pemerintah Desa

Administrasi secara etimologis Administrasi berasal dari kata Ad- dan ministrate yang berarti sebagai berikut: melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengandalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, mendayagunakan. Sedangkan dalam bahasa perancis, disebut dengan perkataan Administrasi. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu Administratio dan kata sifat Administrativus yang dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai Administration. Menurut Widjaja (2002:87) menyatakan Administrasi sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Gie (dalam Syafie, 2003:4) Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat penting bagi manusia guna mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat penting bagi manusia yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Mengingat pentingnya administrasi saat ini berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri administrasi yaitu :

- a. Dilaksanakan oleh sekelompok orang, artinya lebih dari satu orang
- b. Adanya kerjasama, baik vertical maupun horizontal.
- c. Adanya pembagian tugas dan kerja sama yang jelas.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan tugas.
- e. Adanya tujuan yang ingin di capai.

Pemerintahan menurut Strong (dalam Syafie, 2002:12) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengandalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk

mencukupi keuangan masyarakat dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Syafie (2003:136) menyatakan Pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaja (1999:19) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran tentang desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.1 Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 3 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kesatuan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari Pemerintahan di atasnya. (Saparin, 2000:36). Berdasarkan pendapat diatas, Dengan demikian Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah, memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan pusat. Berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Menurut Nurcholis (2011:75). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri dari atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
 - 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.2.2 Fungsi Pemerintah Desa

Menurut Rivai (2004:53) Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dijelaskannya bahwa, berdasarkan empat bagian fungsi pemerintahan tersebut maka untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diamsuksikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa

(Muhammad Indrawan.) 5067 pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Rasyid dalam Labodo 2014:34).

Untuk mengemban tugas negara menurut (Ndraha, 2010:36), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

a). Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa pertahanan dan keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi

b). Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan kemandirian masyarakat dan melaksanakan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat.

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
- b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinya.
- c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya, partisipasi ini tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa

kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

- d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
- e. Fungsi Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

2.2.3 Peranan Pemerintah Desa

Untuk memahami tentang peran pemerintah desa, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah konsepsi mengenai peran dan pemerintah desa. Konsep peran sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivai (2006:148) peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Levinson dalam Soekanto (2003:243) menyatakan bahwa, peran mencakup tiga hal sebagai berikut.

- a. Norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan dalam memahami peran pemerintah desa adalah mengenai pemerintah desa itu sendiri. Definisi pemerintah berbeda dengan pemerintahan, jika pemerintahan terdiri dari badan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang biasa disebut dengan *trias politica*. Maka pemerintah hanya berupa badan eksekutif saja, Badan eksekutif tersebut terdiri dari presiden dan para stafnya. Berperan sebagai pelaksana pembangunan negara serta menyelenggarakan pemerintahan.

Melihat dari definisi di atas maka dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa (staff desa), yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai lembaga eksekutif desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah dari badan, eksekutif, legislatif di tingkat desa, yakni terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Strong (dalam Suradinata, 2002:13), pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik kedalam maupun keluar, yang pertama harus mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undang-undang, dan ketiga harus mempunyai kekuatan finansial. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sementara menurut Utrech (dalam Suradinata, 2002:14), mendefinisikan pemerintah dengan tiga pengertian yang berbeda, pertama: pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa, memerintah, kedua: pemerintah sebagai gabungan badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara, ketiga: pemerintah dalam arti kepala negara (presiden bersama dengan para menteri).

Beberapa teori tersebut, menyatakan bahwa pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk memerintah sebuah Negara. Bertugas untuk melindungi serta mensejahterahkan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun non-ekonomi.

Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Pada pasal 1 Undang-undang No 06 tahun 2014 disebutkan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kedua pengertian mengenai pemerintah dan desa, maka pemerintah desa merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melindungi masyarakat, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta sebagai wakil dari masyarakat desa untuk hubungan luar maupun dalam desa. Menurut Widjaja (2003:3) pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu: kepala desa dan perangkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian selanjutnya dalam pasal 26 dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Kebijakan otonomi desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat desanya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. PP No.72 Tentang desa menjelaskan bahwa

pelaksanaan pembangunan di desa salah satunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Maka dari itu dapat kita lihat berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemerintah desa memiliki peran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang salah satunya dapat melalui aspek perekonomian.

Dengan adanya penjelasan mengenai peran pemerintah desa diatas memudahkan peneliti dalam melihat peran pemerintah desa dari kacamata yang sesuai. Yang mana salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan di desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, yang memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah pemerintah desa. sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah desa tersebut dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui aspek ekonomi.

2.3 Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Sebelum menjelaskan pengertian mengenai fasilitator terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai fungsi dari pemerintah desa, karena adanya fungsi tersebut yang berakibat memunculkan adanya peran dari pemerintah desa itu sendiri. Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar. Peranan pemerintah pun semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian pelayanan umum oleh dinas-dinas pemerintah yaitu mengatur, mendorong, mengoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerah-daerah. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri (Labolo, 2010:39).

Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah sangat luas mengingat peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang efisien, efektif, cepat dan tepat

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan.

Dalam Mudrajad Kuncoro (2004: 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis.
- b. *Koordinator*, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya.
- c. *Fasilitator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya.
- d. *Stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan fungsi pemerintah sebagai fasilitator, khususnya fasilitator dalam upaya peningkatan usaha industri *handicraft*. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram yang merupakan kewajiban pemerintah Desa Tutul.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai fasilitator, pemerintah dalam hal ini juga mencakup pemerintah yang ada di desa (pemerintah desa). Pemerintah sebagai fasilitator dapat dimaknai

bahwa pemerintah desa merupakan agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat.

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda-benda atau bisa juga berbentuk uang/dana.

Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan peningkatan usaha industri *handicraft* yang dimiliki oleh UKM.

1. Fasilitator di Bidang Pendampingan sangat diperlukan untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha. Pendampingan ini bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan.
2. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan Disamping pemberian bantuan pendampingan, juga diperlukan fasilitas dalam bidang pendanaan maupun permodalan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep fasilitator dan juga pemerintah sebagai fasilitator di atas memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember khususnya bagi masyarakat yang menjalankan industri *handicraft*. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator ini menjadi penting untuk dijelaskan karena merupakan fokus dari penelitian ini. Setelah menjelaskan kondisi industri *handicraft* di Desa Tutul beserta dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri disana, kemudian peneliti akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa tersebut dalam menanggapi adanya permasalahan terkait berjalannya kegiatan di industri *handicraft* yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas. Fasilitator adalah seseorang yang melakukan

fasilitasi, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Jika peranan seorang ahli adalah menawarkan saran mengenai isi materi suatu diskusi, maka peranan fasilitator adalah untuk membantu bagaimana suatu diskusi itu dapat berlangsung. Secara singkat tanggungjawab seorang fasilitator adalah untuk mengarahkan pada keberlangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan (Bacal: 2007).

Adapun tugas fasilitator dalam pendampingan kelompok adalah :

- a. Menyampaikan informasi
- b. Menjadi juru bicara/pemimpin
- c. Narasumber (membawa info dari luar)
- d. Membantu memecahkan masalah

Fasilitator adalah tenaga profesional yang disediakan oleh program untuk mendampingi masyarakat dalam mencapai tujuan program. Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi diatas maka seorang fasilitator perlu dibekali dan memiliki beberapa kemampuan, antara lain:

- 1) Kepemimpinan Seorang fasilitator juga akan menjalankan fungsi kepemimpinan di masyarakat sehingga mereka seharusnya memiliki kapasitas untuk membuka visi, membimbing, memberi motivasi, menggerakkan sekaligus berperan sebagai mediator antarwarga masyarakat dan pihak lain yang diperlukan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan.
- 2) Konseptual yang dimaksud kemampuan konseptual adalah kemampuan menerjemahkan pemikiran dan konsep yang rumit menjadi mudah diterima/dipahami masyarakat serta merangsang lahirnya ide-ide baru untuk perubahan yang positif.
- 3) Komunikasi Kemampuan komunikasi yang dibutuhkan adalah:
 - a. Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi Fasih dan jelas dalam menyampaikan pesan, informasi, ide, atau gagasan kepada masyarakat merupakan syarat mutlak seorang Fasilitator dalam menjalankan proses

fasilitasi. Dengan kemampuan itulah, Fasilitator dapat menjelaskan dan memberikan kontribusi kepada anggota dan kelompok masyarakat.

- b. Menjadi pendengar yang aktif Jika seorang Fasilitator mampu menjadi pendengar yang aktif maka sangat mungkin tahu apa yang terjadi dan peka terhadap perasaan serta emosi dibalik ungkapan kata yang disampaikan oleh masyarakat. Hal itu merupakan dasar pengambilan sikap dan tindakan terbaik untuk dilakukan. Untuk menjadi pendengar yang baik dan aktif, diperlukan suatu pengendalian emosi atau perasaan diri, serta sikap untuk bisa menghargai setiap pendapat dan gagasan yang disampaikan masyarakat.
- c. Bertanya secara efektif dan terarah Bertanya secara efektif akan memudahkan seorang Fasilitator untuk belajar dan mengerti apa yang terjadi sekaligus dapat memberi pemahaman untuk dapat memilih dan menemukan alternatif tindakan. Bertanya efektif dan terarah dapat dilakukan jika Fasilitator telah menguasai dan memahami program yang disampaikan.
- d. Kemampuan dalam pengembangan masyarakat Beberapa kemampuan yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 1. Mengenal isu-isu lokal.

Seorang Fasilitator perlu memahami benar serta menghayati isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan sehingga tahu apa yang harus dan bisa dilakukan oleh masyarakat.
 2. Kemampuan identifikasi
Kemampuan mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan, dan fenomena yang ada di masyarakat merupakan awal dan bekal seorang Fasilitator untuk melakukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan ini diperlukan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar program berjalan optimal.
 3. Kemampuan analitis
Dengan menggunakan kemampuan analitis, seorang Fasilitator dapat mengurai dan mengkaji masalah, menyusun berbagai alternatif

penyelesaian serta membuat prakarsa kreatif dan kontekstual dalam upaya pemberdayaan.

4. Adaptasi partisipatif

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, harapan, dan karakteristik masyarakat merupakan bekal yang sangat positif bagi kegiatan fasilitasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat berupa keterlibatan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan, serta dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan program. Di sisi lain, keberadaan masyarakat menuntut Fasilitator untuk dapat melibatkan pemikiran dan aksi mereka agar dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan program.

5. Berpandangan positif ke depan (visioner)

Diharapkan para Fasilitator selalu berpandangan secara positif dalam banyak hal sehingga tidak mudah terjebak pada pengambilan posisi dalam setiap masalah secara sebagian-sebagian dan hanya didasarkan pada kepentingan sesaat/jangka pendek, tetapi segala sesuatu harus dipandang secara utuh berdasar pada tujuan yang jauh ke depan.

6. Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis

Kerap kali “dengan kata” saja dirasa tidak cukup karena akan selalu ada tuntutan bukti dan tindakan nyata. Begitupun dengan masyarakat, seorang Fasilitator dituntut untuk melakukan sesuatu yang nyata sebagai wujud sebuah pernyataan serta bukti keberadaan dan kepeduliannya terhadap masyarakat.

Untuk itu, Fasilitator perlu memiliki kemampuan teknis sebagai berikut:

- (a) Pengetahuan dan kemampuan tentang bagaimana sesuatu harus dikerjakan.
- (b) Keahlian di bidangnya dan berpengalaman.
- (c) Pemahaman akan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (d) Mampu mengendalikan proses pelaksanaan pekerjaan.
- (e) Kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi tugas operasional.

(f) Memiliki daya tahan, kesanggupan, ketekunan, dan keuletan dalam menyelesaikan tugas.

7. Kemampuan menjalin hubungan sosial dan antarmanusia

Seorang Fasilitator harus memiliki kapasitas untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan rekan kerja, berkaitan dengan bagaimana memperlakukan dan berinteraksi dengan mereka serta menempatkan mereka dengan prinsip kesetaraan.

2.4 Konsep Industri

2.4.1 Pengertian Industri

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini usaha perakitan atau reparasi juga merupakan bagian dari industri, selain itu juga industri tidak hanya berupa barang, tetapi jasa juga termasuk industri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Indonesia No. 19/M/I/1896, industri diklarifikasikan menjadi

a. Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Adapun industri yang termasuk kelompok IKD adalah berikut :

1. Industri kimia organik, misalnya : industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil.
2. Industri kimia organik, misalnya : industri semen, industri asam sulfat, dan industri kaca.
3. Industri agrokimia, misalnya : industri pestisida dan industri pupuk kimia.
4. Industri selulosa dan karet, misalnya : industri kertas, industri pulp, dan industri ban.

b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini adalah berikut :

1. Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya : mesin traktor, mesin heler, dan mesin pompa.
2. Industri alat-alat berat atau konstruksi, misalnya : mesin pemecah batu, buldozer, excavator, motor grader.
3. Industri mesin perkakas, misalnya : mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, mesin pres.
4. Industri elektronik, misalnya : radio, televisi, dan komputer.
5. Industri mesin listrik, misalnya : transformator tenaga dan generator.
6. Industri kereta api, misalnya : lokomotif dan gerbong.
7. Industri kendaraan bermotor (otomotif), misalnya : mobil, motor dan suku cadang kendaraan bermotor.
8. Industri pesawat, misalnya : pesawat terbang dan helikopter.
9. Industri perkapalan, misalnya : pembuatan kapal, dan reparasi kapal.
10. Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya : mesin produksi, peralatan pabrik, dan peralatan konveksi.

c. Aneka Industri (AI)

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut :

1. Industri tekstil, misalnya : benang, kain, dan pakaian jadi.
2. Industri alat listrik dan logam, misalnya : kipas angin, lemari es, dan mesin jahit, televisi, dan radio.
3. Industri pangan, misalnya : minyak goreng, gula, teh, kopi, terigu, garam, dan makanan kemasan.
4. Industri kimia, misalnya : sabun, pasta gigi, shampoo, tinta, plastik, dan pipa.

5. Industri bahan bangunan dan umum, misalnya : kayu gergajian, kayu lapis, dan marmer.

d. Industri Kecil (IK)

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, misalnya : industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah).

e. Industri Pariwisata

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomi dari kegiatan wisata baik berupa wisata seni dan wisata budaya (pertunjukan seni dan budaya), wisata pendidikan (peninggalan, arsitektur, observasi alam, dan museum geologi), wisata alam (pemandangan alam di pantai, perkebunan, dan kehutanan), wisata kota (melihat pusat pemerintahan, perbelanjaan, wilayah pertokoan, restoran, hotel, dan tempat hiburan). (Source: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17768/4/Chapter%20II.pdf>).

Meskipun industri kecil memiliki definisi yang berbeda-beda tetapi secara garis besar perusahaan kecil di Indonesia menurut Ni Putu Eka Lestari (2014) dalam disertasinya strategi pemberdayaan industri kecil kerajinan ukiran memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Manajemen berdiri sendiri atau tidak ada pemisahan tegas antara pemilik dan pengelola perusahaan.
2. Modal yang disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil pemegang modal.
3. Daerah operasinya pada umumnya local, meskipun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri.
4. Ukuran perusahaan baik segi total aset, jumlah karyawan sarana dan prasarana kecil.

Dalam hal ini kerajinan tangan yang ada di Desa Tutul Kecamatan Balung merupakan bagian dari industri kecil dikarenakan terdapat beberapa ciri-ciri menurut Tambunan(2012) diantaranya adalah orientasi pasar banyak yang

menjual ke pasar domestic dan luar negeri dan juga melayani kelas menengah atas.

Secara rinci berikut penjelasan mengenai beberapa karakteristik usaha kecil menengah atau industri kecil menengah menurut Tambunan (2012:7) dapat diketahui berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2.1 Karakteristik Usaha Kecil Menengah di Negara Sedang Berkembang

No	Aspek	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beberapa beroperasi di sector formal, beberapa tidak terdaftar, sedikit yang bayar pajak.	semua di sector pajak dan terdaftar bayar pajak.
2	Organisasi dan Manajemen	Dijalankan oleh pemilik ILO, MOF, ACS	Banyak yang mengerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS
3	Sifat dari kesempatan kerja	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai tenaga kerja digaji dan memiliki sistem pengrekrutan formal
4	Pola/sifat dari proses produksi	Beberapa memakai mesin baru	Banyak yang mempunyai derajat mekanisme yang tinggi/ mempunyai akses terhadap teknologi tinggi
5	Orientasi pasar	Banyak yang menjual ke pasar domestic dan ekspor dan melayani kelas menengah keatas	Semua menjual ke pasar domestic dan banyak yang diekspor dan melayani kelas menengah keatas
6	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik	banyak yang berpendidikan baik dari rumah tangga non miskin, banyak yang termotivasi bisnis/profit	Sebagian besar berpendidikan baik dan rumah tangga makmur, motivasi utama profit
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Beberapa memakai bahan baku dan menjual akses kredit formal	Banyak memakai bahan baku impor dan mempunyai akses kredit modal

Sumber: Tambunan (2012:7)

Adanya penjelasan mengenai konsep industri berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan objek yang akan peneliti teliti di lapangan nanti. Salah

satu objek yang sangat penting yaitu adanya objek industry handicraft yang dijalankan oleh masyarakat. Sehingga dalam Bab 2 ini perlu dijelaskan konsepsi mengenai industry.



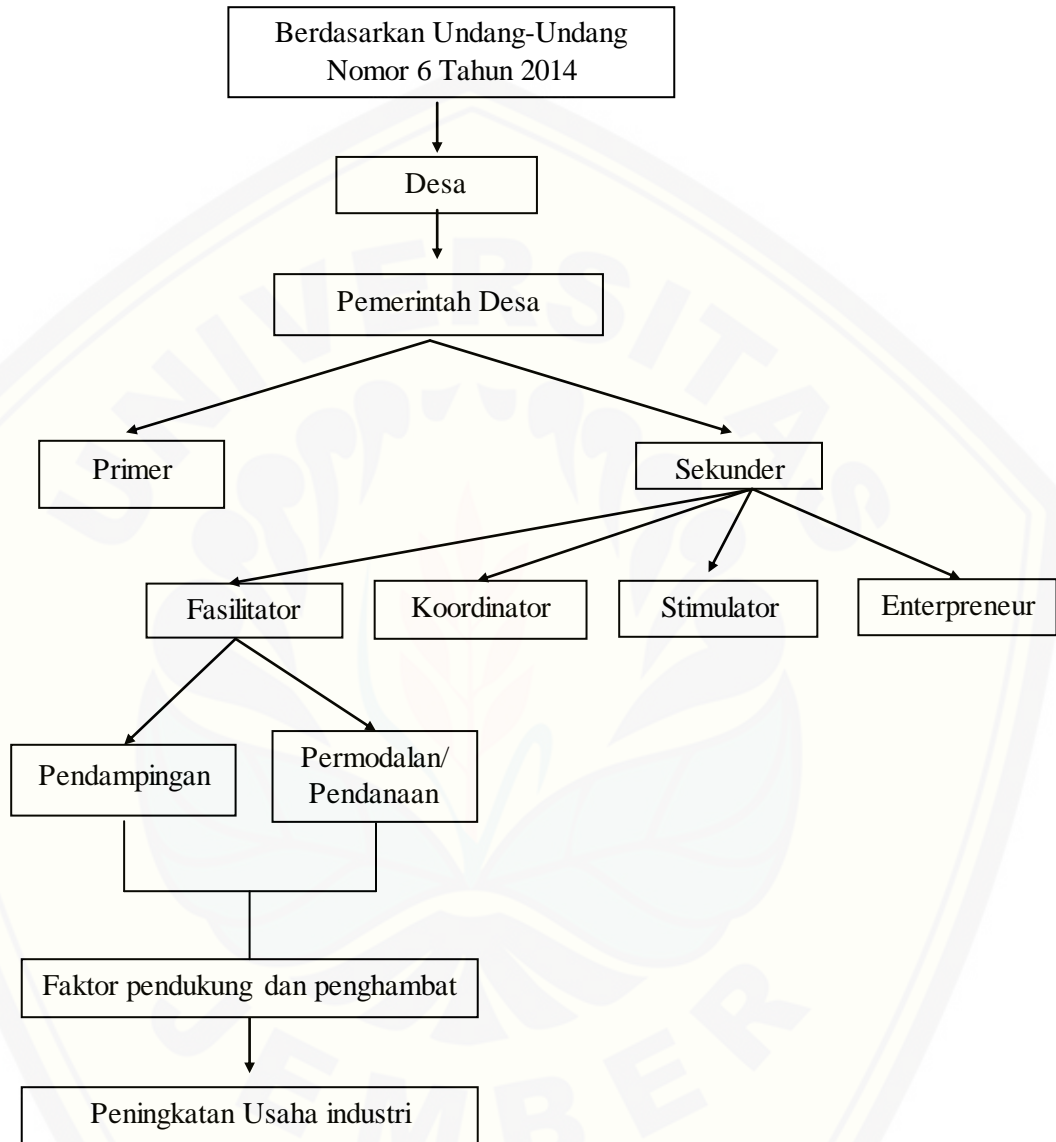
2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di kabupaten magetan	Peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dalam program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas
Tahun	2016	2017
Penulis	Hamami Cahya Prastika	Wulan Ayuningtyas Agustin
Lembaga	Universitas Airlangga	Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran dinas koperasi dan UMKM serta dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten magetan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di kabupaten magetan ? 2. Bagaimana partisipasi para pengrajin usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi sebagai upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dalam program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas ?
Metode penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Persamaan dengan peneliti	1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif
Perbedaan dengan peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat peneliti 2. Waktu peneliti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian 2. Waktu penelitian

2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Metode penelitian akan sangat membantu peneliti di bidang sosial untuk menemukan informasi, menjelaskan keadaan, dan membantu menciptakan ide-ide yang baru. Dengan memilih metode yang tepat untuk suatu penelitian akan menjadikan hasil dan rekomendasi penelitian lebih akurat dan tepat guna. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian;
2. Tempat dan waktu penelitian;
3. Data dan sumber data;
4. Penentuan informan;
5. Teknik dan alat pengumpulan data;
6. Teknik pemeriksaan keabsahan data;
7. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi tertentu. Penjelasan lain disampaikan Arikunto (2003:310) yang dikutip dari Prastowo (2012:111) bahwa metode deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil bagaimana pemerintah desa sebagai fasilitator usaha industri *handicraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:8) yaitu sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Gunawan (2013:83) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah

“Suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi serta dilakukan dalam latar (*Setting*) yang alamiah”.

Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang pemerintah desa sebagai fasilitator usaha industri *handicraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember secara sistematis, menyeluruh, sesuai kondisi alamiah, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan metode ilmiah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Adapun waktu yang dirumuskan peneliti yaitu Mei sampai Juni 2018. Beberapa alasan peneliti menyatakan perlu untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai pemerintah desa sebagai fasilitator peningkatan usaha industri *Handicraft*
2. Desa Tutul dicanangkan sebagai desa produktif di Jawa Timur pada tahun 2013 karena di desa tersebut penduduknya mayoritas bekerja membuat kerajinan tangan dan tidak ada pengangguran.

3.3 Data dan sumber data

Data memegang peran penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) mendefinisikan data sebagai kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Sedangkan pengertian sumber data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu tentang pemerintah desa sebagai fasilitator usaha industri *handicraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dari hasil observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, catatan lapangan dan wawancara.
2. Data Sekunder Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur dan dokumen usaha industri *handicraft* di Desa Tutul

3.4 Penentuan informan

Menurut Moleong (2014:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Moleong (2014:132) menyatakan, kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. Dalam menetapkan seorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Dengan demikian akan mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2012:132-133) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.

Kriteria untuk menentukan informan menurut Sugiyono (2013:56-57) adalah sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.

Menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti. Penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Penguasaha *Handicraft*
4. Pembeli *handicraft* dari Desa Tutul

Berikut daftar sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini.

- a) Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pemerintah Desa
 - Sejarah perkembangan usaha *handicraft* di Desa Tutul
 - Yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan usaha *handicraft*
 - Permasalahan yang dihadapi pengrajin
 - Hambatan dalam upaya peningkatan usaha *handicraft*
- b) Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pengrajin
 - Sejarah perkembangan usaha *handicraft* di Desa Tutul
 - Proses pembuatan *handicraft*
 - Cara promosi produk dari Desa Tutul

- Yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan usaha handicraft
 - Permasalahan yang dihadapi pengrajin
 - Hambatan dalam upaya peningkatan usaha handicraft
- c) Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pembeli
- Alasan memilih membeli produk kerajinan Desa Tutul
 - Cara mendapatkan informasi tentang adanya produk dari Desa Tutul
 - Kekurangan yang masih dimiliki pengrajin
 - Saran dan masukan terhadap pengrajin

3.5 Teknik dan alat pengumpulan data

Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan data digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Telaah Pustaka;
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Wawancara

3.5.1 Telaah pustaka

Telaah pustaka merupakan teknik untuk memperoleh data dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, konsep studi terdahulu maupun permasalahan yang akan diteliti dari literatur yang telah ada seperti buku atau jurnal penelitian. Menurut Silalahi (2012:96) telaah pustaka memiliki peranan

penting dalam penelitian untuk menghindari duplikasi, membantu merancang tahapan penelitian dan membantu peneliti untuk membentuk kerangka teoritis terkait masalah penelitian yang akan dikaji.

3.5.2 Observasi

Definisi observasi menurut Gunawan (2014: 143) observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera, dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi sendiri menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis
- c. Ekperimental atau lawannya nonekperimenetal.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi sistematis. Pengertian teknik observasi non-partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang observer tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana pemerintah desa sebagai fasilitator usaha industri *handicraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Observasi Peneliti lakukan semenjak penyusunan proposal penelitian sekitar pada bulan Maret tahun 2018 di Desa Tutul dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran fenomena yang ada disana.

3.5.3 Dokumentasi

Merupakan metode yang dilakukan untuk meningkatkan ketetapan pengamatan. Dokumentasi ini dilakukan untuk merekam pembicaraan dan juga dapat merekam suatu perbuatan yang dilakukan oleh responden ada saat wawancara (Nazir, 2009:193) sedangkan Menurut Sugiyono (2013:82), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Mengenai dokumentasi, data yang peneliti ambil dari lapangan adalah dimulai dari tahun 2016 hingga 2018, karena mengingat jangka waktu yang relevan untuk diteliti dan mengantisipasi keberadaan data yang valid.

3.5.4 Wawancara

Menurut Moleong (2014:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut Gunawan (2014:160) mengungkapkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Maksud tertentu pada pengertian diatas adalah percakapan yang dilakukan mengarah kepada topik atau tema permasalahan dalam penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak, yaitu pihak yang mewawancarai (peneliti) dan yang diwawancarai (informan). Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Tabel 3.1 Teknik Perolehan Data

Aspek	Sub Aspek	Sumber Data	Teknik
Pendampingan	a.Menyampaikan informasi	Kantor Desa	Observasi,
	b.Menjadi juru bicara	Tutul, Tempat	Wawancara
	c.Narasumber (membawa info dari luar)	Pengrajin	Dokumentasi
	d.Membantu memecahkan masalah		
Pendanaan dan Permodalan	Pemerintah Desa membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan	Kantor Desa Tutul, Tempat Pengrajin	Observasi, Wawancara Dokumentasi
Faktor pendukung dan	- Factor pendukung - Factor penghambat	Kantor Desa Tutul, Tempat	Observasi, Wawancara

Aspek	Sub Aspek	Sumber Data	Teknik
penghambat peningkatan usaha handicraft		Pengrajin	Dokumentasi

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012:327) teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari 8 tahapan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, auditing.

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensi 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Dalam penelitian ini peneliti memilih 4 teknik pemeriksaan keabsahan adalah sebagai berikut.

1. Ketekunan atau Keajegan

Pengamatan Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Maka dari itu untuk menguji keabsahan data, peneliti berupaya melakukan penelitian secara tekun dan ajeg dengan cara sesering mungkin ke lokasi penelitian, mengamati dan mengikuti kegiatan pengrajin handicraft.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332), triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini.

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data-data;
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

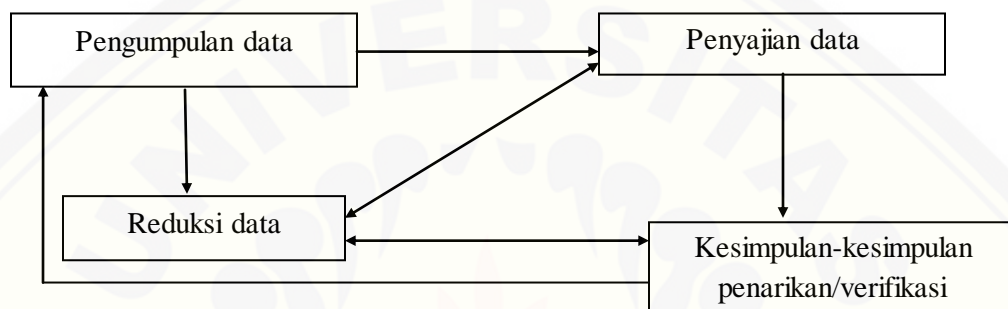
Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimasukkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti berdiskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti. Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Teknik penyajian (display) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap memberikan gambaran keseluruhan

data tersebut. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian.

Gambar 3.1 Komponen Analisis data kualitatif



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:92)

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif.

- a. Penumpulan data peneliti lakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Apabila dilihat dari settingnya, data yang peneliti kumpulkan berasal dari pemerintah desa di kantor desa dan para pengrajin di rumahnya. Berdasarkan sumber data, dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer peneliti kumpulkan dari wawancara dan observasi, sedangkan data primer peneliti dapatkan dari dokumentasi.
- b. Langkah selanjutnya dalam penyajian dan analisis data adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk membuat tahap reduksi data mampu menunjukkan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, dan membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat gambaran. Pada penelitian ini, peneliti memilah data penelitian

yang saling berkaitan dan dikelompokkan. Data yang dikelompokkan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya peningkatan usaha handycraft di Desa Tutul, termasuk kegiatan pelatihan dan kerjasama dengan PT Telkom serta BLK dalam peningkatan usaha handycraft. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai upaya peningkatan usaha handycraft di Desa Tutul.

- d) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teks naratif pada bab 4 Hasil dan Pembahasan yang bertujuan untuk mendiskripsikan hasil penelitian terkait permasalahan peneliti.
- e) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini dicantumkan pada bab 5 Kesimpulan. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam peningkatan usaha handicraft di Desa Tutul adalah sebagai berikut:

Peran Pemerintah Desa Tutul sebagai fasilitator dalam peningkatan usaha *handycraft* diwujudkan dengan:

1. Fasilitator di Bidang Pendampingan pemerintah desa melaksanakan perannya melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah memfasilitasi adanya pelatihan bagi sumber daya manusia yang ada di Desa Tutul, membuka akses kerjasama dengan berbagai pihak, membantu mempermudah pengurusan administratif, membantu dalam perolehan bahan baku, pemerintah desa sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.
2. Selain itu Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator juga diwujudkan dalam Bidang Pendanaan dan Permodalan. Hal ini ditandai dengan Sebagai perantara antara pihak pemberi pinjaman dengan para pengrajin. Pemerintah desa memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengrajin yang mengurus persyaratan untuk mengajukan pinjaman kepada bank atau pihak lain
3. Terdapat factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Peningkatan Usaha Industri *Handycraft*. Faktor pendukungnya adalah Adanya motivasi yang tinggi dai para pengrajin untuk selalu berubah menggapai kondisi yang lebih baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kondisi pasar yang tidak dapat ditebak serta pemasaran yang masih melalui pengepul

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Pemerintah desa sebagai Fasilitator peningkatan Usaha Industri *Handycraft* di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut

1. Diharapkan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan usaha handicraft bisa lebih melihat kondisi sesungguhnya yang terjadi, dapat menemukan solusi masalah, mempertahankan Desa Tutul sebagai desa produktif karena menghasilkan kerajinan tangan tasbih dan aksesoris menjadi desa yang maju, yang dikenal luas.
2. Pemerintah Desa Tutul sebaiknya membuat label merk untuk hasil kerajinan khas desa tutul, agar tidak terjadi perbedaan harga, dan tidak terjadi persaingan tidak sehat di masyarakat khususnya mereka para pengrajin
3. Pemerintah Desa Tutul sebaiknya meningkatkan lagi perannya sebagai fasilitator dalam bidang pendanaan dan permodalan agar industry handicraft yang ada disana bisa tetap terus bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar & Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Andi Prastowo. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fayol, Henry. *Industri dan Manajemen Umum*. Terj. Winardi. London: Sir Issac and Son, 1985.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jim Ife, Frank Tesoriero (2008). *Alternatif Mengembangkan masyarakat di Era Globalisasi, Cetakan 1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Keban. Yereimas T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta :Gava Media
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Labodo, Muhammadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif. edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Yopi N. (2013). *Gerbang Kreativitas: Jagat Kerajinan Tangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga : Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV ALFABETA
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Poerwadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Syafie, Kencana Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Syafie, Inu Kencana. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penilaian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. 2011. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Jakarta: Kencana
- Tulus, Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta:LP3ES.
- Widjaja, AW. 2002 *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Website

<https://kbbi.web.id/> (diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 20.35 WIB)

Bacal, 2007). <http://lingkardemokrasikita.blogspot.com/2012/03/fasilitator-dan-peranannya.html> (diakses pada tanggal 10 Mei 2018 Pukul 08.35 WIB)

<http://repository.unpas.ac.id/11600/4/BAB%202.pdf>(diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 08.15 WIB)

<https://andriraf.files.wordpress.com/2014/11/03-tugas-teori-ap.pdf> (diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 09.31 WIB)

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/10/JURNAL%20\(10-12-15-10-37-57\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/10/JURNAL%20(10-12-15-10-37-57).pdf) (diakses pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 23.10 WIB)

<http://digilib.unila.ac.id/16617/17/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 00.31 WIB)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Source: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU.HTM>)

LAMPIRAN

I. Dokumentasi Penelitian



Lokasi Penelitian



Pencananga Desa Tutul sebagai Desa Produktif



Wawancara dengan Pengrajin *Handycraft*



Wawancara dengan Pengrajin *Handycraft*



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Pengrajin *Handycraft*



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan

II. Pedoman Wawancara

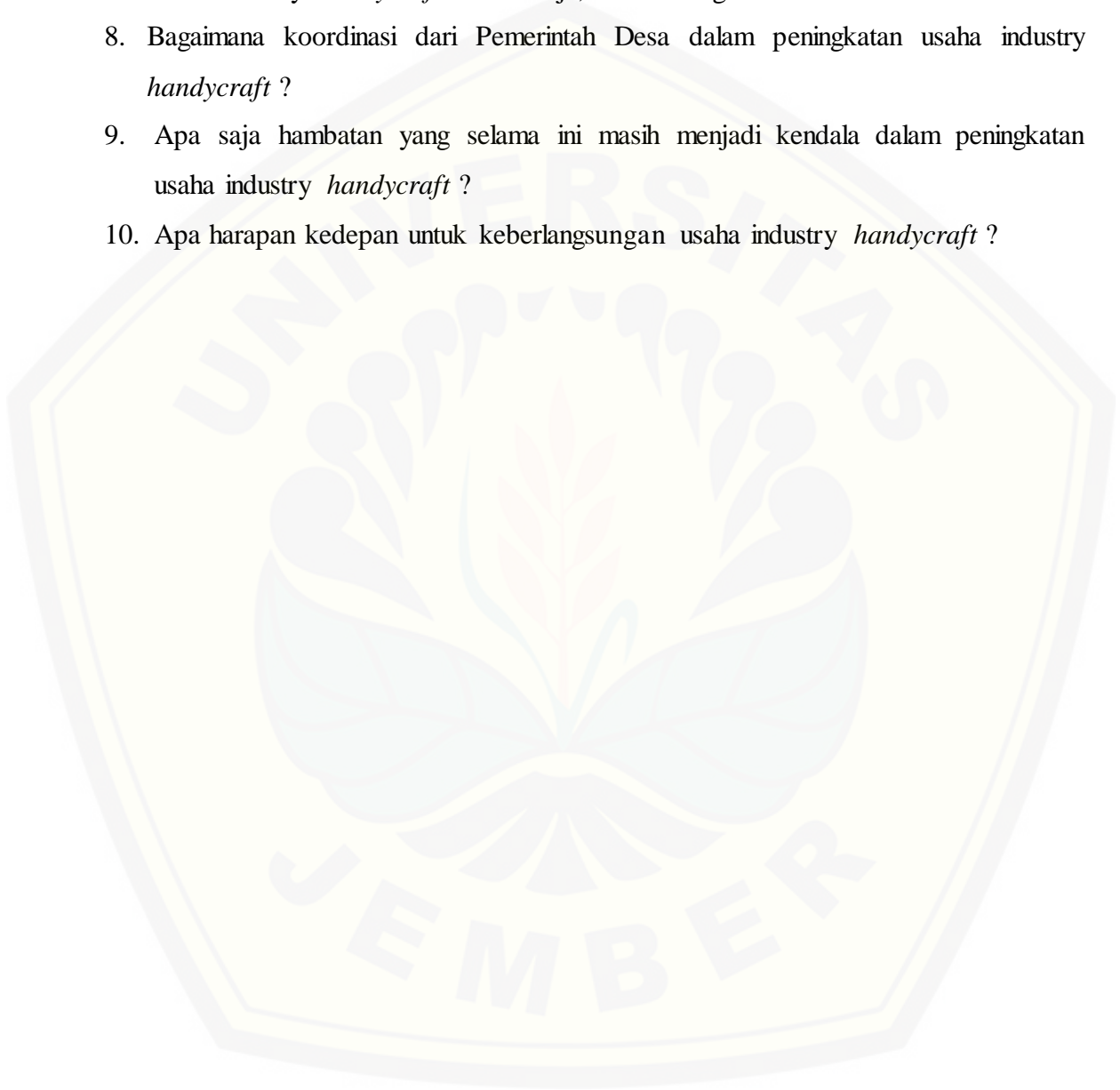
PEDOMAN WAWANCARA I PEMERINTAH DESA TUTUL, KECAMATAN BALUNG, KABUPATEN JEMBER

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Sejak kapan usaha *handycraft* mulai berkembang dan dijalankan di Desa Tutul ini?
2. Bagaimana dahulu awal munculnya para pengusaha *handycraft* hingga menjadi sentra seperti saat ini?
3. Apakah ada struktur/Peraturan Desa yang mengatur mengenai usaha industry *handycraft* ? Jika belum ada, mengapa tidak dibuat Peraturan Desa tentang hal tersebut?
4. Apa peran pemerintah desa dalam peningkatan usaha industry *handycraft*?
5. Sebagai fasilitator apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya peningkatan usaha industry *handycraft* ?
6. Apakah ada organisasi/tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk menangani terkait dengan peningkatan dan pengembangan usaha industry *handycraft*?

7. Semenjak adanya program atau kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa bagaimana dampak/pengaruh terhadap penghasilan masyarakat yang menjalankan usaha industry *handycraft* ? sama saja, atau meningkat?
8. Bagaimana koordinasi dari Pemerintah Desa dalam peningkatan usaha industry *handycraft* ?
9. Apa saja hambatan yang selama ini masih menjadi kendala dalam peningkatan usaha industry *handycraft* ?
10. Apa harapan kedepan untuk keberlangsungan usaha industry *handycraft* ?



PEDOMAN WAWANCARA II**MASYARAKAT PEMILIK USAHA INDUSTRY *HANDY*CRAFT**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan !

1. Bagaimana awal ide atau gagasan awal sehingga memilih usaha *handycraft*?
2. Sejak kapan usaha *industry handycraft* ini dijalankan?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam peningkatan usaha *industry handycraft*?
4. Apakah ada musyawarah yang digunakan untuk menampung ide/gagasan saat ada hambatan yang dialami pengusaha *handycraft* dalam menjalankan usahanya?
5. Bagaimana cara mempromosikan produk dari usaha *industry handycraft* ini?
6. Darimana asal bahan baku utama untuk usaha *industry handycraft* didapatkan?
7. Setelah produk selesai diproduksi, akan dipasarkan kemana saja produk tersebut?
8. Sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan usaha *industry handycraft* apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa?
9. Dari upaya tersebut apakah sudah efektif dalam meningkatkan usaha *industry handycraft* di Desa Tutul?
10. Apakah ada struktur/Peraturan Desa yang mengatur mengenai usaha *industry handycraft* ? Jika belum ada, mengapa tidak dibuat Peraturan Desa tentang hal tersebut?

11. Apa saja hambatan yang selama ini masih menjadi kendala dalam peningkatan usaha industry *handycraft* ?
12. Apakah ada kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan usaha industry *handycraft* ?
13. Bagaimana dampak bagi masyarakat pemilik usaha industry *handycraft* setelah adanya fasilitasi dari pemerintah desa?
14. Adakah bantuan dana dari pemerintah (desa, daerah atau dinas) dalam proses pengembangan usaha industry *handycraft*?
15. Apa harapan kedepan untuk keberlangsungan usaha industry *handycraft* ?

